

GLOBALISASI, GEREJA INJILI DAN TRANSFORMASI SOSIAL

FERRY Y. MAMA HIT

PENDAHULUAN

Sebuah penelitian terhadap keprihatinan sosial gereja injili, khususnya terhadap masalah kemiskinan di dua kota besar Jakarta dan Bandung, mengungkapkan bahwa sekitar 20-27% dari seluruh responden telah mengalokasikan dana untuk urusan sosial dan itu dilakukan 1-4 kali per tahun, dan *kemungkinan* hal itu dilakukan secara seremonial, maksudnya dilakukan pada saat perayaan-perayaan gerejawi seperti Paskah, Natal atau acara tertentu.¹ Informasi ini mengisyaratkan betapa kurangnya tanggapan komunitas orang percaya terhadap masalah kemiskinan. Tindakan sosial belum menjadi sebuah “gaya hidup.” Di satu sisi, gereja injili memang masih sedang bergumul dengan masalah kekurangpekaan terhadap masalah-masalah sosial, namun, di sisi lain, masalah kemiskinan itu sendiri telah menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Celakanya, kemiskinan ini terjadi karena sebuah proses “alamiah” yang tak terelakkan: globalisasi. Sebuah pernyataan menegaskan hal ini,

*Globalization has resulted in new forms of exploitation, dependence, and the impoverishment of a larger number of people. In many Asian countries, this is experienced in the unequal distribution of wealth, inter-religious tensions and violence, cultural and environmental destruction and political instability.*²

¹Interpretasi pribadi dari penulis terhadap data-data yang diberikan. Juga, walaupun penelitian ini dilakukan di kalangan gereja-gereja “injili,” tetapi penulis berpikir bahwa, sebagai sampel, ini dapat menggambarkan kondisi gereja-gereja di Indonesia (Tim Peneliti ICDS, “Gereja dan Kemiskinan: Suatu Survey tentang Respons Gereja Kalangan Injili di Kota Jakarta dan Bandung terhadap Masalah Kemiskinan,” *Jurnal Studi, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan* 4/1 [2002] 15-17).

²Ginda P. Harahap, “Church Structures and Globalization: Asian Perspectives,” *The Lutheran World Federation* 47 (August 2001) 61.

Mengingat globalisasi mempunyai dampak yang besar, baik secara positif maupun secara negatif, maka gereja-gereja injili perlu lebih memahami apa sesungguhnya proses ini dan bagaimana menghadapinya secara tepat dan bijak.

Tulisan ini akan berusaha menjelaskan apa globalisasi itu dan bagaimana dampak-dampak negatif yang dihasilkannya, khususnya dalam bidang sosioekonomi. Selanjutnya, pembahasan akan ditujukan kepada bagaimana sikap gereja sejauh ini dan apa yang menyebabkan sikap seperti itu terjadi. Akhirnya, tulisan ini akan mengusulkan semacam kerangka konseptual teologis (*conceptual theological framework*) sederhana, bagaimana gereja injili dapat menjadi agen perubahan (transformasi) sosial di tengah-tengah gelombang globalisasi dengan segala akibatnya yang tak terbendung itu. Sementara banyak orang di Indonesia dan sebagian negara-negara miskin dan berkembang menghadapi dampak sosioekonomis globalisasi, diharapkan melalui tulisan ini, gereja-gereja injili dapat semakin berperan sebagai agen transformasi sosial, yang dapat menyatakan Kristus sebagai Penebus yang membarui dan mentransformasi masyarakat (bdk. paradigma *Christ the Transformer of Culture* dari Richard Niebuhr).³

GLOBALISASI: SEBUAH PENGANTAR

Masalah-masalah sosioekonomi tidak dapat dipisahkan dari globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi,⁴ sebab masalah-masalah ini sering dipahami sebagai dampak langsung dari proses “mendunia” ini. Sebelum memahami lebih jauh hubungan antara keduanya, penting untuk memberi pemahaman dasar dan singkat tentang apa arti globalisasi ini.⁵ Globalisasi

³Dalam karyanya *Christ and Culture*, Richard Niebuhr mendefinisikan kebudayaan secara luas, termasuk peradaban, eksistensi sosial, hasil-hasil yang dicapai manusia, dan nilai-nilai yang terdapat di dalam dunia ini ([New York: Harper, 1951] 23-39). Lih. juga esainya “Types of Christian Ethics” dalam *Authentic Transformation: A New Vision of Christ and Culture* (Glen H. Stassen, D. M. Yeager, and John H. Yoder, eds.; Nashville: Abingdon, 1996) 15-29.

⁴M. Douglas Meeks menegaskan bahwa tempat yang lebih tepat untuk istilah “globalisasi” adalah dalam tatanan atau dimensi ekonomi (“Ekonomi Global dan Globalisasi Pendidikan Teologi,” *Setia* 1 [1998] 76).

⁵Secara terminologis, kata “globalisasi” (*globalization*) tidak ditemukan di kamus atau ensiklopedi bahasa Inggris yang standar seperti *Webster's Collegiate Dictionary*, *Encyclopedia Britannica*, atau *Encyclopedia Americana* sehingga kata ini sulit untuk didefinisikan. Istilah ini memang baru populer di sekitar dua dekade terakhir ini, dan

adalah istilah yang sangat umum, seperti apa yang dijelaskan oleh salah satu definisi berikut:

*Globalization is a process by which some values or some techniques are globally imposed and consequently accepted as necessary for and indicative of human kind's "progress" . . . the universal character of human rights, the global demand for justice and the increasing awareness of the principles of democracy—as human values that are allegedly being globalized in the course of this process.*⁶

Menurut Hector Archytas, “*globalization is the process of integration of the world community into a common system either economical or social.*”⁷ Dalam pengertian ini, globalisasi dipahami sebagai sebuah proses integrasi masyarakat dunia ke dalam sebuah sistem ekonomi atau sosial. Proses semacam ini secara konkret dapat dilihat dari meningkatnya mobilitas barang, layanan, tenaga kerja, teknologi dan kapital di seluruh dunia, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan keterhubungan dan saling ketergantungan pasar-pasar dan bisnis-bisnis dunia (*increasing the connectivity and interdependence of world's markets and businesses*).⁸ Semua proses “mendunia” secara dramatis ini terjadi karena makin berkembang dan berlimpahnya penemuan teknologi-teknologi yang baru dan inovatif, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga melaluinya, orang makin mudah untuk melakukan perjalanan, komunikasi dan bisnis di mana, kapan, dan kepada siapa saja. Dengan demikian, fenomena globalisasi adalah keterhubungan seluruh pelosok dunia pada tingkat pengembangan (*extensity*), penekanan (*intensity*), percepatan (*velocity*) dan pengaruh (*impact*) yang luar biasa, yang belum pernah ada sebelumnya.⁹

kebanyakan kata ini dipakai dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan terutama dalam konteks ekonomi (*global economy*).

⁶Aloysius Pieris, “Globalization: Buddhists and Christians in a World Colonized by the Market,” *Dialogue* 24 (1997) i-iv.

⁷Lih. artikelnya “The Future of Globalization,” <http://www.lautbry.tripod.com/cpce/globalization>.

⁸Pemerintah Canada dalam situs resminya memberi penjelasan seperti ini dan globalisasi di sini lebih diberi tekanan sebagai salah satu sistem ekonomi (<http://canadianeconomy.gc.ca/english/economy/globalization.html>). Sebuah forum yaysan ekonomi internasional yang bersifat *private*, World Economic Forum, juga memiliki konsep yang demikian (lih. <http://www.investorwords.com/cgi-bin/getword.cgi?2182>).

⁹David Held, et al., *Global Transformation* (Cambridge: Polity, 2000) 17.

Pengertian ini paling tidak ingin mengemukakan beberapa hal: *pertama*, adanya sesuatu, entah itu nilai atau sistem, yang bersifat universal (global) seperti hak azasi manusia, keadilan dan demokrasi, dan dalam kaitannya dengan bahasan ini, penekanan globalisasi ada pada konteks yang lebih spesifik, konteks ekonomi; *kedua*, dalam konsep globalisasi yang semacam ini, tidak ada sistem yang dapat independen dan terisolasi, sebaliknya, semuanya telah menjadi satu dalam sebuah perkampungan global (*a global village*); dan *ketiga*, apa saja yang terdapat dalam proses yang mendunia ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting dan perlu, yang harus diterima karena alasan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, beberapa hal di atas jelas menunjukkan bahwa tampaknya globalisasi adalah sebuah konsep yang cukup positif karena ujungnya diharapkan akan bermuara pada suatu hasil yang positif pula, kebaikan semua orang di seluruh dunia sebagai “satu dunia” atau “satu keluarga manusia.”¹⁰

Tetapi dalam perkembangannya, proses ini tidak berakhir pada sesuatu yang positif seperti yang diharapkan pada awalnya, *euphoria* sudah mulai memudar, karena globalisasi dalam pengertian di atas secara perlahan tetapi pasti telah berubah menjadi polarisasi, antara yang kuat dan yang lemah.¹¹ Polarisasi ini dalam proses atau perkembangan sejarahnya telah melalui tiga tahap: tahap *pertama*, globalisasi penaklukan wilayah-wilayah dagang atau yang disebut petualangan perdagangan (*mercantilist adventure*).¹² Pada tahap ini, bangsa-bangsa Barat yang sangat berkuasa, dalam hal kekuatan teknologi navigasi laut, armada dagang sekaligus militer, berekspansi ke seluruh belahan bumi mencari dunia-dunia baru yang kaya sumber daya alam dan menaklukkannya.¹³ Hasilnya, terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat di kerajaan-kerajaan kolonial

¹⁰Menurut Carlo Fonseka, setengah abad yang lalu, konsep ini pertama kali digulirkan oleh Wendell Wilkie sebagai terjemahan praktis dari proses globalisasi (“Globalization and Universality of Humankind,” *Dialogue* 24 [1997] 1).

¹¹Gamini Corea, “Globalization or Polarization?,” *Gleanings* 9/1 (January-April 2000) 26-31, 38.

¹²Eymard de Silva Wijeratne, “Christian Contribution to Globalization and Its Role in Constraining the Negative Impact of Globalization,” *Dialogue* 24 (1997) 79.

¹³Contohnya, kerajaan Spanyol pada abad keenam belas dan ketujuh belas di bawah Raja Philip II yang dengan sukses telah membawa supremasi militer Spanyol, dengan menaklukan Italia, Eropa Utara dan daerah-daerah di benua Amerika. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Spanyol mencapai zaman keemasan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang politik, ekonomi, begitu juga dalam bidang agama (J. H. Elliot, *Spain and Its World 1500-1700* [New Haven: Yale University Press, 1989] 7-16, 23, 227).

tersebut, di mana mereka bukan saja berhasil menguras sumber-sumber daya alam, tetapi juga berhasil memperbudak orang-orang pribumi dan menguasai pasar dagang di daerah-daerah jajahan tersebut.¹⁴

Tahap *kedua*, globalisasi penerapan sistem ekonomi kapitalis, yang menjadi cikal bakal globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Setelah terjadi penumpukan kapital dan diikuti dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat, beberapa kerajaan itu kemudian berubah menjadi negara-negara industri yang sangat maju di mana penerapan sistem ekonomi kapitalis menjadi pilihan yang paling relevan untuk mempertahankan kemajuan ini, sebab sistem ini secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat inflasi,¹⁵ tetapi semua kemajuan akibat penerapan sistem ekonomi yang demikian telah membentuk masyarakat di negara-negara industri ini ke dalam dua keadaan baru: universalisasi produksi dan pola hidup yang konsumtif.¹⁶ Untuk memenuhi dua kebutuhan ini, negara-negara bekas jajahan yang baru saja merdeka dan masih kaya sumber daya alam tetapi miskin dalam kapital, telah kembali menjadi “sapi perah” model Barat, yang didasari pada konsep 20% populasi dunia menggunakan 80% sumber-sumber alam dunia.¹⁷ Yang menarik, usaha untuk memenuhi kebutuhan ini—seiring dengan usaha untuk menguasai perekonomian dunia—mengatas namakan “bantuan perkembangan” (*development aid*) kepada negara-negara baru yang sedang “berkembang” ini. Dengan demikian, terjadi hegemoni ekonomi yang disponsori oleh institusi-institusi global seperti bank-bank perkembangan multilateral dan badan-badan bantuan bilateral utama seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF).¹⁸

Tahap *ketiga*, globalisasi penguatan kemakmuran terdahulu dengan memodifikasi sistem ekonomi yang lama, yang disebut ekonomi neo-

¹⁴Ibid.

¹⁵Wijeratne, “Christian” 82.

¹⁶Kishan Deheragoda, “Impact of Globalization on the Third World Cultures: A Sri Lankan Experience,” *Dialogue* 24 (1997) 11.

¹⁷Ini berarti bahwa jumlah penduduk masyarakat Barat yang hanya 20% dari populasi dunia telah menggunakan 80% dari sumber daya alam dunia, yang kebanyakan terdapat di negara-negara bekas jajahan. Deheragoda dengan tajam mengatakan, “*globalization of this pattern needed five planets, not one*” (ibid).

¹⁸World Bank berfungsi mengontrol disiplin fiskal dalam kebijakan-kebijakan nasional dan memberi resep-resep dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan nasional bagi pengembangan negara-negara penerima donor. Sementara itu, IMF lebih berfungsi untuk memberi bantuan pinjaman atau modal dan mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang (lih. penjelasan Wijeratne “Christian” 81).

klasikal (*neo-classical economics*).¹⁹ Pada tahap ini, terjadi pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam, dan penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang atau sekelompok bangsa dengan tujuan untuk menjaga dan menguatkan dominasi dan hegemoni ekonomi yang sudah dibangun pada tahap kedua. Penekanan pada tahap ini bukan lagi pada bantuan pengembangan negara-negara miskin atau berkembang, tetapi lebih pada intensifikasi penguasaan pasar dunia, dan prinsipnya, siapa yang dapat menguasai pasar akan menguasai perekonomian dunia.²⁰ Untuk tujuan ini, negara-negara industri maju, yang mana di dalamnya terdiri dari perusahaan-perusahaan multinasional dalam semua konteks ekonomi, telah membentuk pakta-pakta perdagangan dunia, seperti The General Agreement of Trade and Tariffs (GATT) dan World Trade Organization (WTO), yang kemudian sangat berperan dalam mengusahakan liberalisasi dan globalisasi pasar, dan selanjutnya, hanya akan melayani kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut.²¹

Hal ini dapat dipahami karena apa yang dilakukan oleh badan-badan perdagangan dunia tersebut telah menghasilkan gejala ekonomi yang berbeda dari dekade-dekade sebelumnya. Gejala ekonomi ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut: *pertama*, peningkatan aliran modal internasional yang pesat (*accelerating international capital flow*). Di sini, uang menjadi komoditas perdagangan yang jumlahnya berlipat ganda dibandingkan jumlah perdagangan biasa. Para investor dapat menanamkan uangnya di pasar modal dan dalam hitungan detik dapat menarik modalnya kembali, dengan demikian pasar modal rentan terhadap guncangan turun naiknya saham; *kedua*, peningkatan volume perdagangan internasional. Volume perdagangan menjadi berlipat ganda dari volume produksi. Produksi di sini tidak lagi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk mendatangkan keuntungan dengan cara diperdagangkan dari satu tangan ke tangan lainnya. Akibatnya, harga barang menjadi lebih mahal dari

¹⁹Ibid.

²⁰M. Douglas Meeks menegaskan, “*Globalization, then, means that there is one global economy and that those who can comprehend or control the household rules of global economy, its logic, its resource allocation, and its markets will survive and secure*” (“Globalization and Oikoumene in Theological Education,” *Quarterly Review* 11/3 [1991] 69).

²¹Deheragoda, “Impact” 11. Globalisasi dan liberalisasi yang demikian telah menjadikan baik ekonomi maupun masyarakat selalu dipahami dalam konteks “pasar” (*market*), atau dalam istilah Karl Polanyi, hal ini dimengerti sebagai sebuah ekonomi pasar (*a market economy*) dan sebuah masyarakat pasar (*a market society*). Pembahasan Polanyi lebih lengkap tentang hal ini dapat dibaca dalam karyanya, *The Great Transformation* (Boston: Beacon, 1957).

harga produksi; *ketiga*, proses produksi yang makin terintegrasi secara internasional (*internationally integrated production*). Perusahaan-perusahaan multi dan transnasional telah membentuk jaringan-jaringan kerja internasional yang bertujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan mendapatkan tenaga kerja murah di negara-negara miskin dan mendekatkan industri dengan konsumennya, demi sebuah penghematan biaya produksi dan transportasi; dan *keempat*, proses pasar global. Pemasaran produk-produk asing ini terjadi secara lintas negara dan tanpa batas. Produk-produk asing dengan superioritas dan popularitasnya dapat dijual-belikan dengan mudah di semua pasar di dunia, dengan demikian, implikasinya, produk lokal yang kurang bermutu dan populer akan terlempar dari pasar.²²

DAMPAK SOSIOEKONOMIS GLOBALISASI

Dari tahap-tahap di atas, tampak jelas bahwa terlepas dari semua hal yang positif yang telah dihasilkannya,²³ globalisasi secara umum telah gagal dalam mencapai tujuan awalnya. Alasannya adalah bahwa, *pertama*, proses mendunia ini lebih didorong oleh hegemoni ekonomi. Perusahaan-perusahaan multinasional yang disponsori oleh negara-negara industri di atas telah menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi yang mengontrol perekonomian dunia. Ini dilakukan dengan cara membatasi pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadikan diri mereka sebagai pengambil keputusan utama, tetapi yang menyedihkan, pada saat yang sama mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap akibat dari tindakan yang sudah dilakukan itu,

*The great global enterprises that make the key decisions—about what they eat and drink, what they read and hear, what sort of air they breath and water they drink, and, ultimately which societies will flourish and which city blocks will decay—are becoming less and less accountable to the people whose lives they change.*²⁴

²²Disimpulkan dari bagian tulisan Robert Setio, “Krisis Global dalam Era Globalisasi” dalam *Teologi Ekonomi* (ed. Robert Setio; Jakarta: Gunung Mulia, 2002) 9-10.

²³Seperti kemajuan dalam bidang teknologi, pasar terbuka (*open market*), peningkatan keuangan, produk, dan kebudayaan di seluruh dunia (Dean Hirsch, “Globalization: The Poor Must Come First,” *Global Future* [First Quarter 2001] 25).

²⁴Meeks, “Globalization” 68. Perusahaan-perusahaan multinasional yang tersebut berpusat di Amerika Serikat, Pasaran Bersama Eropa, dan Jepang—negara-negara ini sesungguhnya yang paling kuat menggulirkan wacana globalisasi ekonomi (ibid. 76).

Contoh yang paling konkret adalah adanya “pendiktean” kebijakan, seperti yang dilakukan penyumbang-penyumbang kaya (*rich donors*) dan beberapa lembaga keuangan internasional, dengan mendesak negara-negara berkembang untuk merevisi dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan domestiknya dalam arah liberalisasi, deregulasi and keterbukaan kepada inisiatif-inisiatif swasta (*the direction of liberalization, deregulation and opening up to private initiatives*).²⁵

Di Indonesia, dengan alasan pemulihan ekonomi (*economic recovery*), pemerintah telah meminta lembaga IMF untuk membantu mengatasi krisis ekonomi yang sangat parah sejak 1997. Pada awalnya lembaga keuangan ini telah menanggapinya secara positif dengan menyediakan hutang berupa dana tunai untuk memperkuat cadangan devisa negara;²⁶ kemudian, karena tidak ingin dana yang dicairkan itu hilang percuma, lembaga ini ingin mendapatkan garansi melalui *Letter of Intent* (LoI), bahwa pemerintah akan menjalankan program-program ekonominya secara baik dan tepat; tetapi, akhirnya, lembaga ini juga mendesak pemerintah untuk mengurangi subsidi, yang berdampak pada kenaikan harga, tarif berbagai barang dan jasa publik (BBM, listrik dan telepon) secara serentak.²⁷ Kondisi ini bukan satu-satunya, sebab masih banyak negara berkembang yang menerima bantuan dari badan-badan keuangan dunia ini, yang makin mengalami kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Prinsipnya, mereka makin kurang mampu mengontrol tujuan-tujuan ekonomi mereka, dan makin tidak mampu memengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di dalam suatu dunia di mana kebijakan nasional dibuat tumpang-tindih oleh penguasa-penguasa perdagangan internasional.²⁸

²⁵Corea, “Globalization” 25. Suzanne de Dietrich menambahkan bahwa hal ini menjadikan kemerdekaan politik negara-negara berkembang tidak berarti banyak sepanjang imperialisme ekonomi masih terus berlanjut dan badan-badan internasional ini mengontrol pasar dunia (*God’s Word in Today’s World* [Valley Forge: Judson, 1967] 58).

²⁶Posisi cadangan devisa (*bruto*) saat ini adalah 33 miliar dollar AS, terdiri dari milik sendiri (netto) 21 miliar dollar, dan “titipan” IMF sebesar 12 miliar dollar (lih. opini A. Tony Prasetyantono, “Mengakhiri Kontrak IMF,” *Kompas* [Selasa, 6 Mei 2003] 4).

²⁷Di sini IMF tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat, dan jika dikritik dan ditolak, maka IMF dan kontraknya—sebagai *benchmark* bagi kalangan internasional untuk mendukung perekonomian Indonesia—dapat saja memengaruhi keyakinan negara-negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) dan Paris Club untuk tidak mendukung perekonomian Indonesia (*ibid.*).

²⁸Christopher Shore, “Even Street Vendors Feel the Effects of Globalization,” *Global Future* (First Quarter 2001) 20.

Kedua, kontrol yang sedemikian komprehensif dan tersistem telah menimbulkan dampak yang sangat luas, khususnya di bidang ekonomi dan di bidang sosial.²⁹ Dari sudut ekonomi, globalisasi telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam pendapatan keuangan dan kesejahteraan hidup. Dalam konteks ini, globalisasi telah berubah esensinya menjadi polarisasi, terpisahnya masyarakat dunia ke dalam dua kutub, kaya dan miskin.³⁰ Lagi pula, perkembangan positif dari globalisasi dan liberalisasi kebanyakan hanya dinikmati oleh negara-negara maju dan kaya, sementara itu negara-negara berkembang dan miskin, seperti di benua Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, dan sebagian besar Asia, tidak menikmati pertumbuhan dan perubahan dari proses ini, bahkan mereka telah dimarginalkan sebagai pelaku ekonomi dunia.³¹ Di seluruh dunia, ada sekitar 1.6 milyar orang yang tidak pernah menikmati standar dan kualitas hidup yang tinggi. Ini bertolak belakang dengan masyarakat di Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang yang sangat menikmatinya, sebaliknya, mereka berjuang untuk bertahan hidup dari upah sebesar 2 dollar AS per hari.³² Dengan demikian, globalisasi bukan lagi semata-mata tentang logika efisiensi pasar yang tidak dapat dihentikan, tetapi juga tentang sebuah dunia yang terbentuk oleh distribusi yang sangat tidak seimbang dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada.³³

Kondisi hegemoni ekonomi yang demikian telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dunia yang sangat serius. Persoalan-persoalan ini dapat dilihat dari beberapa perwujudannya yang negatif, seperti, timbulnya *kesenjangan sosial di negara-negara miskin dan berkembang*.³⁴ Akibat hegemoni politik dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di tingkat global maupun lokal, keuntungan akan diperoleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal dan kapital yang sangat besar

²⁹Fonseka, "Globalization" 2.

³⁰Corea, "Globalization" 26.

³¹Meeks juga menegaskan bahwa 2/3 penduduk dunia ini, sebagai orang-orang marginal, telah ditinggalkan dalam *the global household* dan terancam mati dalam persaingan ("Globalization" 69). Robert B. Reich menyimpulkan siapa saja yang berada di luar *household* ini telah ditentukan untuk mati (lih. karyanya *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism* [New York: Alfred A. Knopf, 1991]).

³²Mike Moore, "Trade rules for Global Commerce," *Global Future* (First Quarter 2001) 1. Lebih parah lagi di Indonesia, sejak runtuhnya ekonomi, upah pekerja turun dari 10 dollar AS ke 1 dollar AS per minggu (Hirsch, "Globalization" 25).

³³Rubens Ricupero, sekretaris umum kelima United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), mengomentari hal ini dalam artikelnya "The Poverty of Globalization and the Globalization of Poverty," *Global Future* (First Quarter 2001) 4.

³⁴Shore, "Even Street" 20.

karena berkesempatan besar untuk mengukuhkan dan mengembangkan jaringannya (*tentacles*-nya) dalam sistem konglomerasi. Hal lain adalah terjadinya *kekacauan politik dan sosial*.³⁵ Karena keadilan ekonomi tidak terwujud dan semakin terakumulasi, maka banyak orang yang terpinggirkan menjadi kecewa. Gelombang protes dan demonstrasi oleh kaum buruh dan orang-orang yang tidak beruntung, dan tidak jarang, diwarnai dengan banyak kekerasan dan kerusakan (*riots*) menjadi berita yang hangat setiap hari. Pada umumnya, mereka menuntut keadilan ekonomi, perubahan sistem ekonomi, dan menghujat para kapitalis berikut jaringan kerjanya. Dampak situasi ini dapat dilihat dengan memuncaknya ketegangan-ketegangan sosial dan politik, misalnya penutupan lapangan-lapangan kerja yang diikuti dengan meningkatnya tingkat pengangguran, kejahatan, dan korupsi di semua level, baik pemerintahan dan non-pemerintahan; penyalahgunaan obat-obat (*drugs abuse*); terorisme; gerakan-gerakan penolakan, gelombang perpindahan penduduk (migrasi untuk mencari daerah-daerah yang menjanjikan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan),³⁶ dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi.³⁷

Di samping itu, terjadi pula *penurunan kualitas hidup manusia*. Di tengah keadaan ekonomi dan sosial yang sangat parah ini, setiap orang (khususnya mereka yang berada dalam usia pendidikan) akan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan kualitas hidup standarnya, seperti menikmati makanan yang bergizi, rumah tinggal yang layak, dan pendidikan yang baik. Contoh yang paling nyata adalah seperti apa yang dikatakan Stephen Woodhouse, mantan wakil UNICEF untuk Indonesia dan Malaysia, “*a real danger of Indonesia is having a lost generation,*” suatu bahaya karena kekurangan gizi, di mana dari 23 juta anak di Indonesia, 2.4 juta-nya dalam keadaan kekurangan gizi.³⁸ Ini belum ditambah dengan jumlah anak yang putus sekolah dan, secara esensial, semua ini akan bermuara pada hilangnya nilai-nilai positif universal seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kemanusiaan. Kondisi yang demikian

³⁵Fonseka, “Globalization” 2.

³⁶Corea, “Globalization” 26. Perlu dijelaskan di sini bahwa penutupan lapangan kerja ini sering dilakukan dengan beberapa alasan umum, misalnya, tuntutan buruh yang terlalu tinggi, kualitas ketrampilan (*skill*) tidak memenuhi standar dan harus diganti dengan rekayasa teknologi, dan situasi bisnis yang tidak kondusif (tidak aman), dan tidak mempunyai sumber daya manusia dan produknya bersaing di pasar internasional, karena devaluasi mutu (lih. Setio, “Krisis” 11-12).

³⁷Fonseka, “Globalization” 3. Deheragoda menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan ini dengan memakai istilah “*irrespective of environmental cost*” (lih. “Impact” 11).

³⁸Statistik yang dibuat oleh UNICEF tahun 1999 (lih. Suwito, “Nightmare” 10).

secara tidak langsung menunjuk pada tiga hal: *pelecehan hak azasi manusia*, di mana setiap orang berhak untuk hidup dengan layak di dunia ini; *kemunduran demokrasi*, dalam arti tidak ada tempat bagi mereka yang berpikir berbeda kecuali di tempat di mana para pecundang berada; dan *sikap pragmatisme yang sempit*, di mana tidak ada lagi pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme, apalagi kosmosentrisme.³⁹ Dari beberapa beberapa hal ini, tampaknya globalisasi tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi, komunikasi dan transportasi, tetapi lebih dipandang sebagai sebuah kekuatan yang sedang mengubah kehidupan sosial zaman ini.⁴⁰

Persoalan-persoalan sosioekonomis di atas tampaknya sulit untuk dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya.⁴¹ Kesulitan yang paling utama adalah adanya kenyataan bahwa kenyataan-kenyataan di atas saling terkait satu dengan yang lain, seperti sebuah lingkaran setan. Globalisasi telah merangkul sekaligus memengaruhi semua aspek dalam kehidupan manusia secara saling terkait. Masalah-masalah ekonomi terkait timbal balik dengan masalah-masalah sosial, politik dan sebagainya. Dengan demikian, apapun alasan dan dampak yang dihasilkan oleh proses yang mendunia ini, ada ongkos yang sangat mahal yang harus dibayar oleh seluruh penduduk bumi ini. Namun, pertanyaannya adalah siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi ini, khususnya, terhadap orang-orang yang menjadi korban globalisasi ini? Apakah ini juga tanggung jawab

³⁹Dijelaskan juga oleh Bas de Gaay Fortman and Berma Klein Goldewijk, "there is no pure economics, since other aspects of human behaviour play part, too; and economics is not inherently ethics," dengan demikian pada dasarnya, ekonomi tidak *inherent* dengan etika—apa yang tepat bagi manusia universal (*God and The Goods: Global Economy in a Civilizational Perspective* [Geneva: WCC, t.t.] 26), seperti dikutip oleh Setio ("Krisis" 13). Kosmosentrisme di sini berarti berpusat pada kosmos (dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan lingkungan hidup) dengan menghargai dan mengusahakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan (disimpulkan dari tulisan Setio ["Krisis" 15-17] yang mengadaptasi pikiran Leonardo Boff dan Virgil Elizondo, "Ecology and Poverty: Cry of the Earth, Cry of the Poor," *Concilium* 5 [1995] ix-xii).

⁴⁰Anthony Giddens, "Living in a Post Traditional Society" dalam *Reflexive Modernization* (Ulrich Beck, Anthony Giddens, and Scott Lash, eds.; Cambridge: Polity, 1994) 56-109, seperti yang dikutip oleh I. Wibowo, "Globalisasi dan Gereja (Indonesia)" dalam *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual* (ed. J. B. Banawiratma; Yogyakarta: Kanisius, 2000) 29-30.

⁴¹Boff dan Elizondo menegaskan bahwa menghadapi hal ini sama saja seperti menghadapi sebuah tembok, karena adanya penonjolan-penonjolan diri (ekstremitas), secara ekonomi dan bahkan agama, tanpa memerhatikan prinsip-prinsip *equilibrium* ("Ecology" ix-xii).

gereja sebagai agen Allah untuk membawa perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya?⁴²

SIKAP APATIS GEREJA INJILI TERHADAP DAMPAK GLOBALISASI

Idealnya, kesadaran terhadap dampak globalisasi ini dan tugas mentransformasi dunia ini—tugas yang tentu maha berat—harus dipikul oleh semua umat manusia dari semua anggota masyarakat dunia lintas bangsa, agama, ilmu dan disiplin. Karena itu, usaha transformasi harus menjadi agenda utama semua orang, demi terwujudnya tatanan dunia yang lebih baik. Dalam konteks ini, kehadiran gereja di tengah-tengah situasi seperti ini bukan suatu kebetulan, tetapi mempunyai “tujuan” untuk menjadi agen Allah dalam membawa transformasi bagi dunia dan masalah-masalah sosialnya.⁴³ Ironisnya, dalam menghadapi masalah-masalah ini, gereja injili telah mengalami perpecahan baik dalam pemahaman maupun dalam sikapnya, di mana ada sebagian yang masih peduli dengan hal itu, tetapi ada juga yang sudah tidak mempedulikannya. Bagi yang terakhir, masalah sosial tidak menjadi sesuatu yang penting dan mendesak. Lebih buruk lagi, karena posisi dan sikapnya yang demikian, gereja injili telah dinilai sebagai gereja yang lebih menyangkali dunia (*world-denying church*) daripada gereja yang melibatkan diri dalam masalah-masalah dunia (*world-engaging church*).⁴⁴

Penilaian di atas memang ada benarnya, sebab harus diakui bahwa sebagian gereja injili selama beberapa dekade terakhir telah mengembangkan sikap yang memisahkan diri, atau lebih tepat, menyangkali dunia di sekitarnya. Untuk menjelaskan hal ini, paling tidak ada beberapa alasan yang dapat membuktikan, misalnya, adanya

⁴²Walaupun Mike Moore mengusulkan bahwa peran dan tanggung jawab ini secara krusial harus lebih banyak diambil alih oleh pemerintah (lih. usulnya ini dalam “Trade” 2), tetapi masalah ini adalah tanggung jawab semua umat manusia, di mana prioritas agendanya harus diarahkan kepada pemecahan masalah-masalah di negara-negara berkembang, khususnya yang termiskin di antara mereka (lih. Ricupero, “The Poverty” 5).

⁴³Emanuel Gerrit Singgih menambahkan bahwa ini adalah semacam bentuk solidaritas orang beriman di tengah masalah-masalah dunia, khususnya terhadap penderitaan umat manusia karena kemiskinan (*Refomasi dan Transformasi Pelayanan Gereja Menyongsong Abad ke-21* [Yogyakarta: Kanisius, 1997] 42).

⁴⁴Charles Ringma, “Transformation Theology: Some Curriculum Issues,” *Phronesis* 2/1 (March 1995) 77-91.

pandangan yang rendah terhadap masyarakat dan kebudayaan. Khususnya ketika memahami hakekat iman Kristen dalam hubungannya dengan aspek-aspek duniawi. Secara teologis, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami doktrin penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa dipahami sedemikian rupa sehingga sangat mencemari seluruh struktur masyarakat dan kebudayaan, dan, dalam pengertian yang sangat ekstrem, dosa telah membuat manusia, hidup dan dunianya, menjadi tidak berarti. Istilah lain yang cukup menjelaskan hal ini adalah devaluasi kebudayaan (*the devaluation of culture*), artinya manusia ketika bertemu dan memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus, ia tidak menghendaki apa-apa lagi, termasuk kebudayaannya. Kebudayaan ini dinilai sudah tercemar oleh dosa, tidak memiliki arti apa-apa lagi dan tidak dapat diperbaiki, diubah atau diarahkan kembali, lebih buruk lagi, kebudayaan hanya menjadi objek untuk diprotes, dikutuk dan disalahkan.⁴⁵ Pandangan demikian memiliki dua sisi negatif, di satu sisi, telah terjadi pemisahan secara dikotomis antara aspek-aspek hidup yang sakral dan yang sekuler, maksudnya, hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani selalu dinilai sakral, sementara yang alamiah dan fisik dinilai sekuler; dan di sisi yang lain, telah membuat orang Kristen menarik diri dari peperangan kosmis di mana gereja terpanggil untuk masuk di dalamnya.⁴⁶

Kemudian, adanya kecenderungan untuk bersikap asketis terhadap masalah-masalah dunia. Alasan ini akan lebih tepat dijelaskan dalam perspektif sosiologi agama. Menurut Max Weber, sebab utama kecenderungan ini bersumber pada sikap asketisme yang berfokus pada “dunia” di dalam diri manusia (*inner-worldly asceticism*).⁴⁷ Jika istilah yang dipakai ini dihubungkan dengan sikap keagamaan, khususnya mereka yang menyebut diri kaum fundamentalis, maka sikap ini mengacu kepada suatu kode moral yang mengorientasikan orang-orang percaya kepada sikap ketegangan (*austerity*), penyangkalan diri yang asketis (*ascetic self-denial*), dan disiplin diri (*self-discipline*).⁴⁸ Konsekuensinya, fokus dan

⁴⁵Istilah dan penjelasan ini diambil dan disimpulkan dari karya Georges Flovorsky, *Christianity and Culture* (Belmont: Nordland, 1974).

⁴⁶Webber, *Common* 198. Peperangan kosmis yang dimaksud di sini adalah *nature* perjuangan orang Kristen sebagai tanggapan terhadap khasiat kematian (kemenangan) Kristus yang bersifat kosmis—yang menyangkut semua struktur kehidupan dan seluruh ciptaan. Gereja dipanggil untuk ikut berpartisipasi dalam kemenangan Kristus secara kosmis ini, dengan pelayanan yang menyentuh seluruh aspek hidup manusia.

⁴⁷Lih. bahasan Max Weber dalam *Sociology of Religion* (Boston: Beacon, 1964) khususnya di pasal 11-16.

⁴⁸James Davidson Hunter, *Evangelicalism: The Coming Generation* (Chicago: University of Chicago Press, 1987) 50.

konsentrasinya tidak lagi kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini, sebaliknya, hanya kepada hal-hal yang berpusat pada “kesalehan diri sendiri.” Daripada terlibat dalam masalah-masalah dunia yang berdosa dan yang dapat mencemarkan kesucian hidup ini,⁴⁹ lebih baik menjauhi dunia dengan cara hidup yang saleh dan mengasingkan diri. Akibat langsung dari sikap seperti ini adalah bahwa persoalan-persoalan di dunia, khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah moral dan sosial, menjadi masalah yang tidak penting, tidak pernah selesai dan semakin rumit.⁵⁰

Selanjutnya, adanya fobia teologis (*theological phobia*) kepada hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu sosial, dalam hal ini berkaitan dengan gerakan “injil sosial” (*social gospel*). Dalam sejarahnya, kepahitan kelompok injili—yang kemudian hari memisahkan diri dari kelompok fundamentalis—terhadap pandangan-pandangan teologis yang lain dimulai sejak terjadinya perpecahan teologis, di mana pada saat itu timbul pemisahan antara kelompok “injili” dan “liberal,” “fundamentalis” dan “modernis,” atau “pietis” dan “aktivis,” dan perpecahan ini berlangsung selama lebih dari setengah abad di Amerika Utara.⁵¹ Pada tahun 1920-an orang-orang injili bereaksi terhadap ekstrem gerakan injil sosial (*social gospel movement*) sebagai refleksi dari nilai-nilai kalangan-menengah masyarakat di mana mereka berkembang.⁵² Akibatnya, mereka menjadi apatis terhadap isu-isu sosial dan kehilangan suara kenabiannya di tengah-tengah masyarakat, seperti yang dijelaskan berikut ini,

The evangelicals reversed their early interest in social action and concentrate their efforts only on cursing personal evils and proclaiming individual salvation . . . in order to be more conservative in theology, evangelicals became also conservative in their approach to politics,

⁴⁹Charles Edwin Jones menyebutkan hal ini sebagai *shameful practices* dalam *Perfectionist Persuasion: The Holiness Movement and American Methodism, 1867-1936* (Metuchen: Scarecrow, 1974). Penjelasan lebih lengkap ada di dalam Appendix 4 dalam karyanya ini.

⁵⁰Hal ini dicermati oleh George M. Marsden dalam penelitiannya di Amerika, di mana sikap asketik dari fundamentalisme, yang menjadi cikal bakal gerakan injili, ini telah berkembang dengan pesat dan memengaruhi budaya bangsa itu (*Fundamentalism and American Culture* [New York: Oxford University Press, 1980] 26, 32, 135, 156).

⁵¹Richard J. Coleman, *Issues of Theological Warfare: Evangelicals and Liberals* (Grand Rapids: Eerdmans, 1972) 167.

⁵²Lih. Athol Gill, “Christian Social Responsibility” dalam *The New Face of Evangelicalism: An International Symposium on the Lausanne Covenant* (ed. C. Reñe Padilla; Downers Grove: InterVarsity, 1976) 92-93.

*economics, culture and social issues. As they preferred to maintain the status quo, they became deaf to the cries of the underprivileged—the prophetic voice was muted, and the worse was that any involvement in social and political movements which sought to change existing structures as always identified as “liberalism” and, even, “communism”—these were the dark ages of evangelicalism.*⁵³

Akhirnya, adanya pengaruh individualisme yang sangat kuat di dalam masyarakat Kristen, khususnya di Barat. Menurut prediksi para futurolog, John Naisbitt dan Patricia Aburden, satu dari sepuluh *megatrends* yang menjadi ciri tahun 1990-an adalah kejayaan individu, maksudnya individualisme akan menjadi fondasi atau dasar masyarakat dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya.⁵⁴ Ini berarti, perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat akan ditentukan oleh sifat individualistik anggotanya. Jika dilihat ke belakang, *trend* ini bukan hal yang baru dalam masyarakat Barat. Bersamaan dengan kelahiran dan perkembangannya di sana, modernisme telah menjadikan individualisme—diartikan sebagai *the elevation of the individual*—sebagai salah satu *hallmarks*-nya, dan dunia individualistik di mana individu itu hidup dipahami sebagai *a realm of autonomous human person endowed with inherent rights*.⁵⁵ Ini adalah sebuah gejala yang terus berubah perlahan-lahan di sepanjang sejarah, dan bahkan individualisme yang radikal telah menjadi alasan pembelaan terhadap orang kaya yang membagi masyarakat (khususnya, di perkotaan) menjadi yang layak *worthy* dan *unworthy*.⁵⁶ Mereka yang ada dan hidup dalam konteks individualisme yang demikian kuat, sadar atau tidak, telah terjebak dalam pola hidup yang sama. Mereka telah terpengaruh menjadi sangat individualis dan kurang prihatin terhadap masalah-masalah sosial yang dialami oleh orang lain, seperti kemiskinan, apalagi mengembangkannya sampai kepada melakukan

⁵³Ibid. 93.

⁵⁴*Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's* (New York: William Morrow, 1990) 298.

⁵⁵Stanley J. Grenz memberi penjelasan ini dalam usulannya bagaimana orang Kristen dapat menekankan *a post-individualistic gospel* dalam menghadapi dampak modernisme di era pascamodern ini (dalam *A Primer on Post-Modernism* [Grand Rapids: Eerdmans, 1996] 167).

⁵⁶David Ward, *Poverty, Ethnicity and the American Cities 1840-1925* (New York: Cambridge University Press, 1977) 225.

pelayanan sosial yang nyata.⁵⁷ Ironisnya, kaum injili, paling tidak di Barat, telah kehilangan sikap kritisnya dengan mengadopsi semangat zaman atau “lebih banyak mengakomodasi dunia.”⁵⁸

Dari beberapa hal di atas, tampak bahwa persoalan mengapa gereja, khususnya yang injili, lebih menarik (menghindarkan) diri dari masalah-masalah sosial cukup kompleks, sebab ini bukan saja menyangkut keyakinan-keyakinan teologis tetapi juga menyangkut efek-efek sosiopsikologis, sehingga sikapnya yang negatif terhadap dunia cenderung permanen dan berkelanjutan. Parahnya, timbul semacam pengkutuban yang ekstrem, apa-apa yang berhubungan dengan pelayanan sosial dilihat sebagai sesuatu yang “tidak ortodoksi,” sementara yang di luar itu, misalnya pelayanan penginjilan, sebagai sesuatu yang “ortodoksi.”⁵⁹ Tidak heran jika otokritik bermunculan dari dalam lingkaran kaum injili sendiri, seperti yang telah dilakukan Carl F. Henry melalui penolakan atas sikap apatis kelompoknya sendiri terhadap dunia dan masalah-masalah sosial di sekitarnya, dan sikap yang semacam ini disebutnya sebagai sebuah pasivitas sosial (*a social passivity*).⁶⁰

GEREJA INJILI SEBAGAI AGEN TRANSFORMASI SOSIAL

Belajar dari kekeliruan di atas, perlu dikembangkan semacam pemahaman yang lebih tepat terhadap peran gereja-gereja injili di tengah-tengah era globalisasi dengan segala dampak negatifnya. Walaupun ada usulan agar gereja dapat melakukan perlawanan (*confrontation*), misalnya mengkritik dan menolak kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah (sesuai “resep” badan-badan keuangan dunia), baik dalam tatanan ilmiah-akademis, membuat seminar dan advokasi, maupun dalam tatanan praksis “turun ke jalan,” berdemonstrasi dan pemboikotan, tetapi gerakan transformasi sosial yang lebih utuh dan menyeluruh adalah sebuah cara lain

⁵⁷Hal ini pernah terjadi di kalangan injili di Amerika, di mana mereka jatuh ke dalam *a radical pietistic individualism* (lih. Douglas F. Ottati, *Reforming Protestantism* [Louisville: Westminster/John Knox, 1995] 11-12).

⁵⁸Francis A. Schaeffer, *The Great Evangelical Disaster* (Westchester: Crossway, 1984) 111-146.

⁵⁹Delos Miles, “Church Social Work and Evangelism,” *Review and Expositor* 85 (1998) 281.

⁶⁰Otokritik terhadap sikap ini dan permohonannya agar kaum injili bangkit untuk terlibat dalam masalah-masalah sosial tertuang dalam dua karya monumentalnya: *The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1947) dan *A Plea for Evangelical Demonstration* (Grand Rapids: Baker, 1971).

yang dianggap jauh lebih efektif, yang dapat dilakukan oleh gereja sebagai agen perubahan sosial.

Sehubungan dengan transformasi sosial ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: *pertama*, transformasi sosial seharusnya didasari atas keutuhan ciptaan. Penciptaan dunia dan alam semesta tidak dapat dipisahkan dari Allah, sang Pencipta. Allah menciptakan dunia ini dalam pengertian *ex-nihilo* dan tidak secara dualistik, deistik atau panteistik. Pada dasarnya, seluruh ciptaan Allah itu baik karena memiliki dimensi hukum moral yang *inherent* di dalam struktur-struktur ciptaan, termasuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), karena itu, di satu sisi, manusia seharusnya memiliki harga diri, dan ini harus dihargai dan dipertimbangkan; dan di sisi lain, manusia itu sendiri harus bertanggung jawab untuk mengarahkan sejarah kepada kehendak-Nya, yang salah satunya adalah dengan mewujudkan sebuah ciptaan baru (*a new creation*) yang bersifat eskatologis.⁶¹ Perwujudan dari ciptaan yang demikian sekarang sudah terjadi dan akan memuncak pada saat Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Dengan demikian, jika melihat alasan di atas, maka dasar keterlibatan Kristen dalam membawa perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya ada di dalam konteks mandat penciptaan dunia ini.⁶²

Kedua, transformasi sosial seharusnya difokuskan kepada manusia dan dunianya. Harus dipahami bahwa manusia dan dunianya sebagai fokus transformasi adalah manusia dan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan ini berakibat sangat fatal, di mana keduanya telah kehilangan hubungan yang selaras dengan Allah—memberontak dan berbalik arah dari Allah, sehingga tatanan keutuhan ciptaan menjadi rusak dan tidak selaras lagi seperti yang rancangannya yang semula.⁶³ Wujud dari kerusakan dan ketidakselarasan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti kejahatan, ketidakadilan, keterasingan, penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh satu manusia ke manusia yang lain. Keadaan seperti ini telah menciptakan sebuah dunia di mana yang kuat melahap yang lemah, lebih sama seperti hidup di dalam *animal society* daripada *human society*.⁶⁴ Bentuk-bentuk ini telah berakumulasi sedemikian rupa dan

⁶¹Webber, *Common* 208-209.

⁶²Vinay Samuel and Chris Sugden, "Toward a Theology of Social Change" dalam *Evangelicals and Development: Toward a Theology of Social Change* (ed. Ronald J. Sider; Philadelphia: Westminster, 1981) 50.

⁶³Webber, *Common* 209.

⁶⁴Pernyataan ini disampaikan oleh Abraham Kuyper dalam pembukaan the First Christian Social Congress di Belanda pada tanggal 9 November 1891 (Lih. *The Problem of Poverty* [ed. James W. Skillen; Grand Rapids: Baker, 1991] 33).

menciptakan sebuah realitas sosial bermata ganda yang paling serius dan terus berkelanjutan: kemiskinan dan ketidakberdayaan. Keduanya berhubungan secara integral, maksudnya, ketidakberdayaan adalah bagian relasional dan integral dari kemiskinan, yang mana kemiskinan telah menjadi konteks hidup orang-orang miskin yang mengalami ketidakberdayaan.⁶⁵

Selanjutnya, kedua hal ini bukan saja bersifat material tetapi juga bersifat spiritual, kemiskinan rohani, di mana manusia mengalami penderitaan karena hubungan dengan Allah, sesama, masyarakat dan ciptaan lain mengalami kerusakan dan disfungsi, sehingga timbul penindasan rohani (dari roh-roh jahat, setan, dan tradisi denatif nenek-moyang), kehilangan harapan dan ketidakmampuan untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi, dan tidak memiliki kuasa untuk mentransformasi hidupnya sendiri.⁶⁶ Kondisi manusia yang demikian seharusnya menjadi fokus utama transformasi sosial. Walaupun manusia dan dunianya telah rusak akibat jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia sebagai jiwa yang hidup, dan bumi sebagai milik Allah, memiliki nilai yang tak terhingga di hadapan-Nya, sehingga Ia mau memberi solusi yang terbaik, dengan memberikan Anak-Nya bagi dunia. Dengan demikian, transformasi sosial Kristen seharusnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan manusia secara utuh, sehingga hal ini terjadi baik dalam dimensi badaniah maupun dalam dimensi rohaniah (keselamatan di dalam Kristus).⁶⁷

⁶⁵Jayakumar Christian, *God of the Empty Hand: Poverty, Power and the Kingdom of God* (Monrovia: World Vision, 1999) 118. Kedua hal ini sesungguhnya hampir sama dengan konsep jebakan kemiskinan Robert Chambers yang lebih luas, di mana kemiskinan dilihat dalam dimensi: (1) *material poverty* (anggota keluarga hanya memiliki sedikit harta benda seperti rumah yang tidak sehat, tidak ada tanah, ternak atau kekayaan), (2) *physical weakness* (anggota keluarga sangat lemah dan tidak sehat karena kekurangan gizi, dan kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang jompo); (3) *isolation* (setiap anggota keluarga kekurangan akses kepada layanan dan informasi masyarakat, seperti tinggal di daerah yang tidak ada infrastruktur minimal dan jauh dari pusat kota); (4) *vulnerability* (anggota keluarga memiliki sedikit kekuatan penyangga menghadapi hal-hal darurat atau bencana, artinya, tidak ada pilihan-pilihan dalam hidup, tidak ada tabungan, dan rawan terhadap tuntutan-tuntutan budaya); dan (5) *powerlessness* (anggota keluarga kekurangan kemampuan dan pengetahuan untuk memengaruhi kehidupan sekitarnya dan sistem sosial di mana mereka hidup). Lih. karyanya yang lain *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983) 103-139.

⁶⁶Bryan L. Myers, *Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational Development* (Maryknoll: Orbis, 1999) 67.

⁶⁷Earle S. Cairns, *The Christian in Society* (Chicago: Moody, 1973) 20-21.

Ketiga, transformasi sosial seharusnya dimungkinkan hanya oleh (melalui) tindakan penebusan dan pendamaian Kristus. Jangkauan tindakan penebusan Yesus Kristus menyentuh seluruh kosmos. Selanjutnya, Yesus Kristus bukan saja sebagai Pencipta dan Penyangga, tetapi juga sebagai Pendamai segala sesuatu yang ada di dunia ini.⁶⁸ Ia dan karya-Nya yang menebus dan mendamaikan ini akan mengubah situasi hidup manusia, yang oleh karena dosa, telah mengalami disintegrasi.⁶⁹ Berfokus hanya kepada karya yang rekonsiliatif ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan transformasi sosial:⁷⁰

1. Rekonsiliasi mentransformasi dunia oleh kasih yang radikal. Kasih ini adalah kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya, Ia menanggapi secara penuh realita yang dihadapi oleh orang-orang yang miskin, sakit, berdosa dan merasa benar sendiri, tanpa menghitung kemajuan sosial dan konsekuensi politik yang ada.
2. Rekonsiliasi menyatakan dosa dan ketidakadilan, dengan tujuan membangkitkan pertobatan. Dalam pemberitaan-Nya, ditekankan bahwa Allah di dalam Yesus telah mendamaikan manusia berdosa. Jadi, dosa di sini didefinisikan oleh makna rekonsiliasi, dan bukan sebaliknya. Dengan melihat karya pendamaian-Nya, manusia dapat mengerti apakah dosa itu sesungguhnya. Tanggapan positif terhadap karya ini akan mendatangkan pertobatan moral.
3. Rekonsiliasi menuntun kepada konflik, dan pada saat yang sama, mengatasinya. Karya Kristus tidak selalu ditanggapi secara positif, artinya, ada juga tanggapan yang negatif. Karena itu, di satu sisi, konsekuensi dari penolakan ini adalah konflik, tetapi di sisi lain, rekonsiliasi yang benar dapat mengatasi konflik, karena dengan masuk ke dalamnya, konflik (dengan akar *self-centeredness*) itu akan diubah oleh kuasa rekonsiliatif itu.

⁶⁸Kedua kata atau istilah ini terkait erat satu dengan yang lain. Penebusan dan pendamaian ada dalam satu paket, karya keselamatan Kristus yang utuh. Meskipun hampir mustahil untuk membedakan keduanya secara ketat, namun ini dapat dibedakan dari penekanannya: *reconciliation* lebih menekankan “pemulihan hubungan,” sedangkan *redemption* lebih menekankan “membayar ganti rugi” (lih. Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* [Grand Rapids: Zondervan, 1994] 580).

⁶⁹Webber, *Common* 209-210.

⁷⁰Disimpulkan dari bahasan Dieter T. Hessel, dalam *Reconciliation and Conflict: Church Controversy over Social Involvement* (Philadelphia: Westminster, 1969) 32-40.

4. Rekonsiliasi menciptakan keyakinan untuk mencapai kemerdekaan manusia. Keadilan dan perdamaian di dalam masyarakat menuntut usaha bersama yang terus menerus dari orang percaya yang sudah didamaikan dengan Allah, karena dengan perdamaian itu, ia percaya bahwa tujuan Allah akan digenapi.
5. Rekonsiliasi mengarahkan tanggapan sosial gereja. Karena karya Kristus ini, gereja didorong untuk bergerak maju ke arah moralitas yang baru, kepada cara hidup bergereja yang positif, kecenderungan sosial, konsistensi dalam memikul beban sosial dan kesiapan untuk bertindak melayani orang lain dan dunia ini secara sosial. Jadi, jika ingin disimpulkan secara sederhana, transformasi sosial dimungkinkan hanya melalui pemulihan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, sehingga ini akan membawa dampak bagi pemulihan manusia dengan diri mereka sendiri, dengan sesama mereka dan dengan alam semesta.⁷¹

Penjelasan di atas sedikitnya dapat memberi semacam kerangka konseptual teologis dalam mengusahakan sebuah transformasi sosial yang injili, walaupun di sini transformasi seperti apa yang ingin dicapai belum begitu jelas atau konkret. Pertanyaan tentang “perubahan dari apa dan kepada apa” adalah pertanyaan kunci untuk memahami tujuan transformasi sosial. Tujuan perubahan ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori:⁷² *pertama*, tujuan yang ada dalam konteks pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Ini mengacu kepada perubahan spiritual dari jiwa yang hilang dan kepada jiwa yang diselamatkan (*saved soul*). *Kedua*, tujuan yang ada dalam konteks pemulihan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Masalah yang ada adalah tubuh yang sekarat (*dying body*), tubuh yang sakit (*sick body*) dan pikiran yang rusak (*broken mind*), dan melalui transformasi sosial, diubah menjadi tubuh yang sehat (*nourished body*), tubuh yang disembuhkan (*healed body*) dan pikiran yang dipulihkan (*restored mind*). *Ketiga*, tujuan yang ada dalam konteks pemulihan hubungan dengan komunitas dan orang lain. Dalam hal ini, yang ingin dicapai adalah perubahan dari sistem sosial yang tidak adil (*unjust social system*) dan kejahatan (*violence*) menuju kepada hubungan-hubungan sosial yang adil (*just social relationships*) dan hubungan-hubungan yang

⁷¹Pemulihan hubungan ini dapat dibagi menjadi empat kategori: *relationship with God, relationship with self, relationship with community and others, dan relationship with environment* (lih. Myers, *Walking* 93).

⁷²Kategori ini diulas sesuai dengan pembagian yang dibuat oleh Myers (ibid.).

terekonsiliasi (*reconciled relationships*). *Keempat*, tujuan yang ada dalam konteks hubungan manusia dengan ciptaan lain. Ciptaan lain, seperti lingkungan hidup manusia, sedang mengalami pembusukan (*decaying creation*), karena itu melalui usaha transformasi diharapkan akan berubah menjadi dunia yang tertopang (*sustaining world*). Beberapa kategori ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara kompleks. Mengingat betapa kompleksnya hubungan ini, maka usaha-usaha transformatif yang dilakukan, baik itu melalui usaha aksi-aksi sosial (*social actions*) maupun melalui pengembangan masyarakat (*community development*), seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan utuh.⁷³

Mandat sebagai agen perubahan ini dapat semakin dimengerti ketika melihat hakekat gereja. Gereja secara umum dipanggil untuk menjadi sebuah komunitas sekaligus sebuah institusi yang dapat menjadi alat perubahan dalam kasih Kristus. Dalam sebuah definisi, gereja dapat diartikan sebagai berikut, “*the church is the association of those who acknowledge God’s transformative way with the world in Jesus Christ, and whose purpose it is to increase love of God and neighbor.*”⁷⁴ Ini menunjukkan bahwa gereja yang transformatif harus dipahami sebagai *koinonia* (komunitas) sekaligus *ekklesia* (institusi atau lembaga), artinya ia adalah “kumpulan orang-orang” yang telah “dipanggil keluar” untuk mengakui, mengenal dan menjadi alat dari cara-cara Allah yang membawa perubahan di dalam Yesus Kristus.⁷⁵ Jadi, dalam melaksanakan misi-Nya, Allah tidak memilih untuk bekerja sendiri atau menggunakan perangkat yang bukan manusia (*non human*), sebaliknya Ia memilih untuk bekerja sama dengan manusia sebagai mitra-Nya untuk mengubah dunia yang penuh masalah ini.

Di samping itu, transformasi di dalam Kristus akan benar-benar terwujud jika gereja menunjukkan kualitas dasarnya sebagai komunitas dan lembaga yang dapat menyatakan kasih kepada Allah dan orang lain secara nyata. Kasih kepada Allah ditunjukkan melalui kasih kepada sesamanya, sebab bagaimana mungkin ia dapat mengasihi yang tidak kelihatan, jika ia tidak dapat mengasihi yang kelihatan (1Yoh. 4:20), baik dalam perbuatan

⁷³Cleo F. Shook menjelaskan bahwa kompleksitas di sini berhubungan dengan sangat luasnya arti “development,” yang biasanya menyangkut bidang sosio-ekonomi, tetapi juga dapat lebih luas dari bidang itu (“Holistic Approach: Evangelism and Community Development—Dichotomy or Synthesis?” dalam *The Ministry of Development in Evangelical Perspective: A Symposium on the Social and Spiritual Mandate* [ed. Robert L. Hancock; Pasadena: William Carey Library, 1979] 87).

⁷⁴Ottati, *Reforming* 94.

⁷⁵Ibid. 95-100.

maupun dalam kebenaran (1Yoh. 3:18).⁷⁶ Dua sisi kasih ini dapat diumpamakan seperti dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan, sebab tidak mungkin membicarakan yang satu tanpa membicarakan yang lainnya, seperti yang ditegaskan David J. Bosch, “*without a faithful and sustained contact with God the church loses her transcendence. Without a true solidarity with the world she loses her relevance.*”⁷⁷ Kasih kepada sesama umat manusia, khususnya kepada mereka yang membutuhkan—seperti orang miskin, yatim piatu, orang sakit, narapidana, dan mereka yang terbuang—adalah pantulan dari belas kasihan Kristus di dalam diri orang-orang Kristen, dan ini diwujudkan dalam tindakan perhatian dan usaha untuk mengubah kehidupan sesamanya menjadi lebih berarti.

Secara misiologis, implikasi dari keterkaitan hubungan ini dinilai cukup serius dan penuh risiko, maksudnya jika gereja gagal dalam memerhatikan dan mengusahakan transformasi, maka sesungguhnya gereja itu sedang gagal dalam memberitakan injil.⁷⁸ Mandat pemberitaan injil, yang pada satu sisi intinya adalah berita perdamaian dan penebusan, adalah juga, di sisi yang lain, mandat untuk melakukan perubahan sosial. Gereja yang berkomitmen untuk memberitakan injil yang seperti ini seharusnya juga memiliki komitmen yang seimbang untuk melakukan tindakan sosial, yang dipahami sebagai aplikasi praktis dari kuasa perdamaian dan penebusan.⁷⁹ Dengan kata lain, misinya di dalam dunia ini bukan saja untuk melakukan pewartaan injil atau penginjilan (*evangelization*) tetapi juga pemanusiaan (*humanization*).⁸⁰ Karena keterkaitan itu, ia tidak boleh berdiam diri ketika melihat orang-orang di sekitarnya sedang berada dalam penderitaan dan terbelenggu secara rohani, sosial, emosional, dan ekonomi, baik karena dosa-dosa mereka maupun karena dosa-dosa orang lain. Konsekuensinya,

⁷⁶Melalui teks-teks ini Karl Barth mengingatkan bahwa “*If the church has not this visibility, then it is not the church*” (*Dogmatics in Outline* [English trans.; London: SCM, 1949] 142).

⁷⁷*Witness to the World* (Atlanta: John Knox, 1980) 222.

⁷⁸David Hartley, “Revisioning the Biblical Mandate: Mission in Modern Asia,” *Church and Society* 3/2 (August 2000) 37.

⁷⁹Oren H. Baker menjelaskan bahwa aksi sosial Kristen adalah aplikasi praktis dari semangat perdamaian dan penebusan, yang membawa orang lain memahami nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang terdapat di dalam rencana Allah dalam Yesus Kristus (lih. “The Church as an Agency of Social Action” dalam *The Church and Social Responsibility* [ed. J. Richard Spann; Nashville: Abingdon-Cokesbury, 1953] 290).

⁸⁰Peter C. Wagner, ed., *Church/Mission Tensions Today* (Chicago: Moody, 1972) 30. Bdk. juga dengan pendapat Peter Beyerhaus, dalam *Missions: Which Way?—Humanization or Redemption* (Grand Rapids: Zondervan, 1971) 92.

sebagai agen perubahan, gereja-gereja injili harus berani berintervensi ke dalam masalah-masalah sosial, dan selanjutnya, dapat melibatkan diri secara aktif dan total dalam usaha mewujudkan transformasi sosial.⁸¹

KESIMPULAN

Karena globalisasi adalah sebuah proses mendunia yang tidak dapat dihindarkan, maka dampak sosioekonomis yang diakibatkannya, yang terwujud dalam bentuk kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, pelanggaran hak azasi manusia, kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup juga menjadi hal-hal yang tak terhindarkan. Bukan sebuah kebetulan jika gereja-gereja, termasuk gereja-gereja injili, secara khusus ditempatkan Allah di tengah-tengah situasi seperti ini sebagai agen perubahan yang membawa nilai-nilai, tanda-tanda dan kuasa kerajaan-Nya di tengah-tengah masyarakat. Dari fungsinya yang demikian, tampak bahwa tempat dan tugas gereja sebagai komunitas orang percaya di dalam situasi dunia sekarang ini sudah cukup jelas, ia harus menapaki juga jalan-jalan transformatif yang sudah Juru Selamat dan Tuhannya lewati. Hanya dengan usaha ini, gereja akan terus disadarkan tentang hakekat dan tujuan keberadaannya di dunia ini. Ini adalah sebuah usaha *conscientization* untuk mendorong orang-orang Kristen mencapai tujuan-tujuan mereka yang sesungguhnya,⁸² tujuan-tujuan Allah yang menyeluruh dan utuh bagi seluruh umat dan ciptaan-Nya. Akhirnya, apa yang telah dideklarasikan beberapa dekade lampau oleh sebuah pertemuan internasional injili, Oxford Conference (1937), seharusnya menjadi panggilan sekaligus pengingat bagi gereja-gereja injili: “*let the church be the church and its social responsibility will take its rightful place.*”⁸³

⁸¹Harvie M. Conn, “Christian Social Ministry: What’s the Problem?” *Urban Mission* 14/1 (September 1996) 17.

⁸²Titus F. Guenther memakai istilah *to conscientize* untuk menjelaskan proses penyadaran ini dalam artikelnya, “Social Change without Violence,” *Missiology* 9/2 (April 1981) 109.

⁸³Tokunboh Adeyemo, “The Church and Its Mandate for Social Change” dalam *The Church: God’s Agent for Change* (ed. Bruce Nichols; Exeter: World Evangelical Fellowship, 1986) 178.